

Soal nomor 3, 2502041956 - Nicholas Javier - LA05

Link Video : <https://www.youtube.com/watch?v=yF9EqOwTXt0>

1. [LO1, LO2, LO3] [25%] Anda memiliki suatu set text (data.3-.txt) yang ingin anda simpulkan dengan bantuan algoritma. Lakukanlah pemodelan text summarization dengan pendekatan extractive dengan menggunakan top 3 and 5 scores untuk masing-masing data. Lakukan evaluasi dengan menggunakan ROUGE score dan jelaskan analisa terhadap hasil summarization yang anda peroleh dan jelaskan pendapat anda mengenai summary yang dihasilkan

```
!pip install rouge-score matplotlib

import pandas as pd
import nltk
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
from nltk.tokenize import sent_tokenize, word_tokenize
from rouge_score import rouge_scorer
import matplotlib.pyplot as plt
import string

Collecting rouge-score
  Downloading rouge_score-0.1.2.tar.gz (17 kB)
  Preparing metadata (setup.py) ... ent already satisfied: matplotlib
in /usr/local/lib/python3.10/dist-packages (3.7.1)
Requirement already satisfied: absl-py in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from rouge-score) (1.4.0)
Requirement already satisfied: nltk in /usr/local/lib/python3.10/dist-
packages (from rouge-score) (3.8.1)
Requirement already satisfied: numpy in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from rouge-score) (1.25.2)
Requirement already satisfied: six>=1.14.0 in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from rouge-score) (1.16.0)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (1.2.1)
Requirement already satisfied: cycler>=0.10 in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (4.53.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.0.1 in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (1.4.5)
```

```
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (24.1)
Requirement already satisfied: pillow>=6.2.0 in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (9.4.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.3.1 in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (3.1.2)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7 in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from matplotlib) (2.8.2)
Requirement already satisfied: click in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from nltk->rouge-score)
(8.1.7)
Requirement already satisfied: joblib in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from nltk->rouge-score)
(1.4.2)
Requirement already satisfied: regex>=2021.8.3 in
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages (from nltk->rouge-score)
(2024.5.15)
Requirement already satisfied: tqdm in /usr/local/lib/python3.10/dist-
packages (from nltk->rouge-score) (4.66.4)
Building wheels for collected packages: rouge-score
  Building wheel for rouge-score (setup.py) ... e=rouge_score-0.1.2-
py3-none-any.whl size=24933
sha256=e821a33abfeb29c9eaeac968ca3efb63ecabfdd6598cbf6c89f995367b877fa
2
  Stored in directory:
/root/.cache/pip/wheels/5f/dd/89/461065a73be61a532ff8599a28e9beef17985
c9e9c31e541b4
Successfully built rouge-score
Installing collected packages: rouge-score
Successfully installed rouge-score-0.1.2
```

```
nltk.download('punkt')
data_path = 'data_3C.csv'
df = pd.read_csv(data_path)
df.head()
```

```
[nltk_data] Downloading package punkt to /root/nltk_data...
[nltk_data]   Unzipping tokenizers/punkt.zip.
```

```
{"summary": "{\n  \"name\": \"df\",\n  \"rows\": 3,\n  \"fields\": [\n    {\n      \"column\": \"Unnamed: 0\",\n      \"properties\": {\n        \"dtype\": \"number\",\n        \"std\": 1,\n        \"min\": 9,\n        \"max\": 11,\n        \"num_unique_values\": 3,\n        \"samples\": [\n          9,\n          10,\n          11\n        ],\n        \"semantic_type\": \"\",\n        \"description\": \"\"\n      }\n    },\n    {\n      \"column\": \"content\",\n      \"properties\": {\n        \"dtype\": \"string\",\n        \"num_unique_values\": 3,\n        \"samples\": [\n          \"TEMPO.CO, Jakarta -Buffer zone atau\n          kawasan penyangga yang memisahkan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta\n          Utara, dengan pemukiman warga kini menuai sorotan, karena sudah
```

diusulkan sejak 2009 silam. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 mengakui usulan tersebut juga dibahas di era kepemimpinannya.\\\\"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencari solusi kepada penduduknya yang ada di situ,\\\\" kata Jokowi saat ditemui mengunjungi para pengungsi kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Minggu, 5 Maret 2023.\\\\"Tanah merah-nya ini kan padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama,\\\\" kata dia. Tanah Merah mengacu pada Jalan Tanah Merah Bawah yang jadi lokasi kebakaran.Jokowi menyebut seharusnya zona ini harusnya menjadi zona air, seperti misalnya dibuat sungai yang memisahkan Depo dan pemukiman. Tujuannya untuk melindungi objek vital yang ada di dalam Depo. \\\\"Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk,\\\\" kata dia.Heru Ungkit Buffer ZoneSebelumnya, kebakaran terjadi di Depo Pertamina pada Jumat malam, pukul 20.11 WIB, 3 Maret 2023. Usulan soal buffer zone ini diungkit Heru saat mengunjungi lokasi kebakaran pada Jumat malam tersebut.Heru menyebut tahun 2009, pemerintah daerah sudah mengusulkan buffer zone selebar 50 meter. Akan tetapi, Heru tak menjelaskan lagi apakah buffer zone ini sudah dibuat, atau hanya dibuat untuk beberapa titik saja.\\\\"Kira-kira begitu, kami kembalikan ke Pertamina,\\\\" kata Heru usai menggelar rapat darurat di Pos Koramil Koja, Jakarta Utara, Sabtu dini hari, 4 Maret 2023. Heru pernah jadi Wali Kota Jakarta Utara 2014-2015 di era Gubernur DKI Jokowi, lalu berlanjut ke era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan Pemerintah Provinsi akan berkerja sama dengan Pertamina untuk melanjutkan rencana pembuatan buffer zone di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara. \\\\"Kita bikin kerja sama, lah, sama Pertamina,\\\\" kata Joko kepada wartawan di Koramil Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Maret 2023.Namun, eks Kepala BPK Bali itu belum merinci soal pembuatan buffer zone ini. \\\\"Ya, pastinya, semuanya itu, upaya-upaya untuk mengarah yang lebih bagus,\\\\" ujarnya.Era Fauzi BowoTahun 2019, Jakarta dipimpin oleh Gubernur Fauzi Bowo. Kala itu, Tempo memberitakan bahwa Kawasan Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara dipastikan akan dibersihkan di tahun tersebut. Wilayah tersebut akan dibangun buffer zone Depo Pertamina Plumpang.\\\\"Pemerintah pusat mentargetkan 2009 ini buffer zone selesai dibangun,\\\\" kata Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.Proses pembangunan dan pembebasan lahan di Tanah Merah, kata Bambang, dilakukan oleh Tim Penataan Depo Plumpang yang duduk sebagai penanggung jawab adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo, dan Wakil Gubernur Priyanto sebagai pelaksana. \\\\"Wali Kota mengerjakan inventarisasi, penyuluhan, dan pembebasan,\\\\" kata Bambang.Proses pembangunan zona penyangga tersebut, lanjut Bambang, sudah memasuki tahap inventarisasi dan sosialisasi kepada warga. Ia mengakui tahap ini tergolong sulit, khususnya memverifikasi pemilik

lahan sebenarnya. \\\\"Bermacam-macam. Ada yang punya sertifikat tanah, agendum, dan lainnya,\\\" ujarnya.IMB Anies DisorotSelain buffer zone, masalah status lahan dan bangunan warga pun jadi sorotan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan sepatutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggungjawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat malam lalu.Menurut Gilbert, sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ada permukiman dalam jarak tertentu. Lahan yang terkena kebakaran tadi adalah milik PT Pertamina.\\\"Lahan milik PT Pertamina ditempati warga akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi IMB, yang jelas bertentangan dengan peraturan,\\\" ujar Gilbert dalam keterangannya pada Sabtu, 4 Maret 2023.Gilbert menilai IMB yang dikeluarkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI membuat persoalan semakin rumit. Menurut dia, saat itu Anies terkesan lebih mementingkan pemenuhan janji kampanye walau harus menabrak aturan.\\\"Kesalahan itu tidak sepatutnya berulang.\\\"Berkaca dari kejadian tersebut, Gilbert penduduk di sekitar Depo Pertamina Plumpang dipindahkan agar tidak menjadi korban lagi.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Sementara kepada penduduk Kampung Tanah Merah pada Sabtu, 16 Oktober 2021.\\\"Ini adalah jalan tengah yang kami ambil untuk menyelesaikan masalah bangunan-bangunan yang berada di tanah yang status legalnya belum tuntas. Tapi mereka faktanya ada di tempat ini sudah puluhan tahun,\\\" kata Anies Baswedan di Kampung Tanah Merah, Sabtu, 16 Oktober 2021.Pertamina enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya mengenai status lahan di Kampung Tanah Merah yang ikut dilalap api kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.Fokus kami saat ini penanganan warga, kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Fadjar Djoko Santoso kepada Tempo pada Sabtu.Pilihan Editor:Depo Pertamina Plumpang Bahaya Dekat Pemukiman, Jokowi: Digeser ke Reklamasi atau Warga Direlokasi\\\",\\n \\\"TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati siang ini langsung menggelar rapat di Depo Plumpang, Jakarta Utara, setelah diperintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi memerintahkan agar ada solusi dalam satu dua hari ini usai kebakaran di Depo Pertamina, apakah fasilitas penyimpanan bensin ini dipindah atau warga di sekitar di relokasi.\\\"Ini mau rapat di sana, ini rapat langsung,\\\" kata Erick usai menemani Jokowi yang mengunjungi para pengungsi kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Ahad 5 Maret 2023.Jokowi datang bersama Erick, Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden, dan Nicke. Nicke juga membenarkan rapat digelar di Plumpang, bersama Erick dan Heru. \\\"Iya,\\\" kata dia, di lokasi.Di lokasi ini, Jokowi telah memerintahkan Erick, Heru, dan Pertamina, mencari solusi usai kejadian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Jokowi memberi dua opsi, Depo Pertamina dipindahkan atau warga yang tinggal direlokasi.\\\"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas,\\\"

kata Jokowi. Ada dua opsi Jokowi belum bisa memastikan apakah nanti warga masih bisa tinggal di lokasi, jika nanti yang akhirnya Depo Pertamina yang dipindah. \\\

"Ini yang baru nanti dibicarakan, ada pilihan-pilihan, apakah deponya yang digeser apakah masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana, tapi harus segera ditemukan solusinya, \\\

" kata dia. Jokowi menyebut Depo Pertamina Plumpang ini merupakan zona bahaya. \\\

"Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi, \\\

" Mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-2014. Jokowi tidak merinci lebih lanjut reklamasi yang dia maksud. Menurut dia, solusi akan dibicarakan oleh PT Pertamina dan Heru. \\\

"Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya, \\\

" ujarnya. Jokowi menyebut seharusnya Depo Pertamina ini harusnya menjadi zona air, seperti misalnya dibuat sungai yang memisahkan Depo dan pemukiman. Tujuannya untuk melindungi objek vital yang ada di dalam Depo. \\\

"Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk, \\\

" kata dia. Wapres usul depo dipindah ke Pelabuhan Kebakaran terjadi Jumat malam, 3 Maret 2023, yang menewaskan 17 orang dan 600 lebih mengungsi. Sebelum Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah lebih dulu mengunjungi pengungsi di Plumpang. Ma'ruf mengusulkan agar depo Pertamina di Plumpang dipindah menjauhi permukiman penduduk pascaterbakar pada Jumat malam kemarin. Kebakaran depo menjalar ke pemukiman warga hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. \\\

"Saya berharap supaya depo ini lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan, di daerah Pelindo. Saya kira begitu, \\\

" ujar Ma'ruf Amin di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Maret 2023. Pilihan Editor: Jokowi Ingin Pindahkan Depo Pertamina dari Pemukiman: Lindungi Obyek Vital \", \n \

"TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M Nur Ramadhan meminta Komisi Yudisial menggali motif hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan Pemilu 2024. \\\

"Menjadi catatan penting adalah bahwa jangan sampai hanya menilai soal putusannya tetapi bagaimana majelis hakim ini mengambil langkah putusan. Nah ini harus didalami oleh Komisi Yudisial, \\\

" ujar Ramadhan Ahad 5 Maret 2023. Menurut PSHK, penggalan motif bertujuan untuk mengurangi spekulasi adanya agenda penundaan Pemilu di masyarakat. \\\

"Memang perlu dipertanyakan dan juga hal ini perlu diperdalam oleh pihak-pihak termasuk masyarakat sipil ya. Dalam hal ini untuk melihat apakah memang benar sesuai dengan apa yang mereka yakini atau di balik ini memang ada sesuatu yang terjadi, \\\

" katanya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan kecurigaan penundaan Pemilu 2024 adalah hal yang wajar karena sebelumnya Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo yang pernah mengungkapkan wacana penundaan Pemilu 2024 ke publik. \\\

"Tentu kita masih ingat dan menjadi hal wajar jika masyarakat khawatir menanggapi putusan pengadilan negeri Jakarta pusat karena dua tiga tahun ke belakang banyak sekali politisi yang

menggaungkan wacana penundaan pemilihan misalnya Menkomarines Luhut binsar Panjaitan dengan big datanya. Kemudian, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaemin. Lalu ada Bahlil menteri BKPM kemudian baru-baru ini ada Ketua MPR Bambang Susatyo,\\" ujanya.Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting menyampaikan pihaknya tengah mendalami putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal putusanpenundaan Pemilu pada persidangan perdata Partai Prima 2 Maret 2023. RencananyaKomisi Yudisialakan memanggil ketiga Hakim PN Jakarta Pusat yaitu T. Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban.\\"Untuk itu, KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi.\\" ujanya dalam keterangan tertulis pada 3 Maret 2023.KY juga telah berkomunikasi bersama Mahkamah Agung dalam mencermati substansi putusan yang dibuat oleh para Hakim tersebut\\"Kami juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini serta aspek perilaku hakim yang terkait.\\"ucapnya.Menurutnya, Putusan Pengadilan sudah seharusnya bersandar aspek demokratis, aspek aspirasi masyarakat secara sosiologis dan patuh pada Undang-Undang Dasar 1945.\\"Putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa karena ada aspirasi yang hidup di masyarakat secara sosiologis, ada aspek yuridis di mana kepatuhan terhadap UUD 1945 dan undang-undang sangatlah penting, serta pertimbangan-pertimbangan lain, seperti nilai-nilai demokrasi.\\" ujanya.Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmemerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda Pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukanPartai Primadengan tergugat Komisi Pemilihan Umum.Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari, seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023.Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban.Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu.Selain penundaan, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi materiil sebanyak Rp 500 juta. Pengadilan juga menyatakan bahwa penggugat, yakni Partai Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi.Pilihan Editor: PSI Dukung KPU Ajukan Banding atas Putusan Penundaan Pemilu\\n \\n],\\n \\\"semantic_type\\\": \\\"\\\",\\n \\\"description\\\": \\\"\\\"\\n }\\n },\\n {\\n \\\"column\\\": \\\"summary\\\",\\n \\\"properties\\\": {\\n \\\"dtype\\\": \\\"string\\\",\\n \\\"num_unique_values\\\": 3,\\n \\\"samples\\\": [\\n \\\"Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa rencana pembuatan buffer zone atau kawasan penyangga yang memisahkan


```

\ "dtype\ ": \ "number\ ",\n          \ "std\ ": 1,\n          \ "min\ ": 9,\n
\ "max\ ": 11,\n          \ "num_unique_values\ ": 3,\n          \ "samples\ ":
[\n          9,\n          10,\n          11\n          ],\n
\ "semantic_type\ ": \ "\",\n          \ "description\ ": \ "\",\n          }\n
n    },\n    {\n          \ "column\ ": \ "content\ ",\n          \ "properties\ ":
{\n          \ "dtype\ ": \ "string\ ",\n          \ "num_unique_values\ ": 3,\n
\ "samples\ ": [\n          \ "TEMPO.CO, Jakarta -Buffer zone atau
kawasan penyangga yang memisahkan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta
Utara, dengan pemukiman warga kini menuai sorotan, karena sudah
diusulkan sejak 2009 silam. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang
pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 mengakui usulan tersebut
juga dibahas di era kepemimpinannya.\\\ "Dulu memang sudah direncanakan
untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai
kepada titik mencari solusi kepada penduduknya yang ada di
situ,\\\ " kata Jokowi saat ditemui mengunjungi para pengungsi
kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Minggu,
5 Maret 2023.\\\ "Tanah merah-nya ini kan padat dan penuh. Semuanya
harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan
masyarakat harus menjadi titik yang utama,\\\ " kata dia. Tanah Merah
mengacu pada Jalan Tanah Merah Bawah yang jadi lokasi kebakaran.Jokowi
menyebut seharusnya zona ini harusnya menjadi zona air, seperti
misalnya dibuat sungai yang memisahkan Depo dan pemukiman. Tujuannya
untuk melindungi objek vital yang ada di dalam Depo. \\\ "Karena
barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk
berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk,\\\ "
kata dia.Heru Ungkit Buffer ZoneSebelumnya, kebakaran terjadi di Depo
Pertamina pada Jumat malam, pukul 20.11 WIB, 3 Maret 2023. Usulan soal
buffer zone ini diungkit Heru saat mengunjungi lokasi kebakaran pada
Jumat malam tersebut.Heru menyebut tahun 2009, pemerintah daerah sudah
mengusulkan buffer zone selebar 50 meter. Akan tetapi, Heru tak
menjelaskan lagi apakah buffer zone ini sudah dibuat, atau hanya
dibuat untuk beberapa titik saja.\\\ "Kira-kira begitu, kami kembalikan
ke Pertamina,\\\ " kata Heru usai menggelar rapat darurat di Pos
Koramil Koja, Jakarta Utara, Sabtu dini hari, 4 Maret 2023. Heru
pernah jadi Wali Kota Jakarta Utara 2014-2015 di era Gubernur DKI
Jokowi, lalu berlanjut ke era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama
alias Ahok.Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan
Pemerintah Provinsi akan berkerja sama dengan Pertamina untuk
melanjutkan rencana pembuatan buffer zone di kawasan Depo Pertamina
Plumpang, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara. \\\ "Kita bikin kerja
sama, lah, sama Pertamina,\\\ " kata Joko kepada wartawan di Koramil
Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Maret 2023.Namun, eks
Kepala BPK Bali itu belum merinci soal pembuatan buffer zone ini.
\\\ "Ya, pastinya, semuanya itu, upaya-upaya untuk mengarah yang lebih
bagus,\\\ " ujarnya.Era Fauzi BowoTahun 2019, Jakarta dipimpin oleh
Gubernur Fauzi Bowo. Kala itu, Tempo memberitakan bahwa Kawasan Tanah
Merah, Plumpang, Jakarta Utara dipastikan akan dibersihkan di tahun
tersebut. Wilayah tersebut akan dibangun buffer zone Depo Pertamina
Plumpang.\\\ "Pemerintah pusat mentargetkan 2009 ini buffer zone

```


selesai dibangun,\\" kata Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. Proses pembangunan dan pembebasan lahan di Tanah Merah, kata Bambang, dilakukan oleh Tim Penataan Depo Plumpang yang duduk sebagai penanggung jawab adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo, dan Wakil Gubernur Prijanto sebagai pelaksana. \\"Wali Kota mengerjakan inventarisasi, penyuluhan, dan pembebasan,\\" kata Bambang. Proses pembangunan zona penyangga tersebut, lanjut Bambang, sudah memasuki tahap inventarisasi dan sosialisasi kepada warga. Ia mengakui tahap ini tergolong sulit, khususnya memverifikasi pemilik lahan sebenarnya. \\"Bermacam-macam. Ada yang punya sertifikat tanah, agendum, dan lainnya,\\" ujarnya. IMB Anies Disorot Selain buffer zone, masalah status lahan dan bangunan warga pun jadi sorotan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan sepatutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggungjawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat malam lalu. Menurut Gilbert, sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ada permukiman dalam jarak tertentu. Lahan yang terkena kebakaran tadi adalah milik PT Pertamina. \\"Lahan milik PT Pertamina ditempati warga akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi IMB, yang jelas bertentangan dengan peraturan,\\" ujar Gilbert dalam keterangannya pada Sabtu, 4 Maret 2023. Gilbert menilai IMB yang dikeluarkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI membuat persoalan semakin rumit. Menurut dia, saat itu Anies terkesan lebih mementingkan pemenuhan janji kampanye walau harus menabrak aturan. \\"Kesalahan itu tidak sepatutnya berulang.\\" Berkaca dari kejadian tersebut, Gilbert penduduk di sekitar Depo Pertamina Plumpang dipindahkan agar tidak menjadi korban lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Sementara kepada penduduk Kampung Tanah Merah pada Sabtu, 16 Oktober 2021. \\"Ini adalah jalan tengah yang kami ambil untuk menyelesaikan masalah bangunan-bangunan yang berada di tanah yang status legalnya belum tuntas. Tapi mereka faktanya ada di tempat ini sudah puluhan tahun,\\" kata Anies Baswedan di Kampung Tanah Merah, Sabtu, 16 Oktober 2021. Pertamina enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya mengenai status lahan di Kampung Tanah Merah yang ikut dilalap api kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Fokus kami saat ini penanganan warga, kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Fadjar Djoko Santoso kepada Tempo pada Sabtu. Pilihan Editor: Depo Pertamina Plumpang Bahaya Dekat Pemukiman, Jokowi: Digeser ke Reklamasi atau Warga Direlokasi\\", \\n \\"TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati siang ini langsung menggelar rapat di Depo Plumpang, Jakarta Utara, setelah diperintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi memerintahkan agar ada solusi dalam satu dua hari ini usai kebakaran di Depo Pertamina, apakah fasilitas penyimpanan bensin ini dipindah atau warga di sekitar di relokasi. \\"Ini mau rapat di sana, ini rapat langsung,\\" kata Erick usai menemani Jokowi yang mengunjungi para pengungsi kebakaran

Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Ahad 5 Maret 2023. Jokowi datang bersama Erick, Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden, dan Nicke. Nicke juga membenarkan rapat digelar di Plumpang, bersama Erick dan Heru. \\\\"Iya,\\\\" kata dia, di lokasi. Di lokasi ini, Jokowi telah memerintahkan Erick, Heru, dan Pertamina, mencari solusi usai kejadian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Jokowi memberi dua opsi, Depo Pertamina dipindahkan atau warga yang tinggal direlokasi.\\\\"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas,\\\\" kata Jokowi. Ada dua opsi Jokowi belum bisa memastikan apakah nanti warga masih bisa tinggal di lokasi, jika nanti yang akhirnya Depo Pertamina yang dipindah. \\\\"Ini yang baru nanti dibicarakan, ada pilihan-pilihan, apakah deponya yang digeser apakah masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana, tapi harus segera ditemukan solusinya,\\\\" kata dia. Jokowi menyebut Depo Pertamina Plumpang ini merupakan zona bahaya. \\\\"Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,\\\\" Mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-2014. Jokowi tidak merinci lebih lanjut reklamasi yang dia maksud. Menurut dia, solusi akan dibicarakan oleh PT Pertamina dan Heru. \\\\"Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya,\\\\" ujar nya. Jokowi menyebut seharusnya Depo Pertamina ini harusnya menjadi zona air, seperti misalnya dibuat sungai yang memisahkan Depo dan pemukiman. Tujuannya untuk melindungi objek vital yang ada di dalam Depo. \\\\"Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk,\\\\" kata dia. Wapres usul depo dipindah ke Pelabuhan Kebakaran terjadi Jumat malam, 3 Maret 2023, yang menewaskan 17 orang dan 600 lebih mengungsi. Sebelum Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah lebih dulu mengunjungi pengungsi di Plumpang. Ma'ruf mengusulkan agar depo Pertamina di Plumpang dipindah menjauhi permukiman penduduk pascaterbakar pada Jumat malam kemarin. Kebakaran depo menjalar ke pemukiman warga hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.\\\\"Saya berharap supaya depo ini lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan, di daerah Pelindo. Saya kira begitu,\\\\" ujar Ma'ruf Amin di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Maret 2023. Pilihan Editor: Jokowi Ingin Pindahkan Depo Pertamina dari Pemukiman: Lindungi Obyek Vital\\", \\n \\\"TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M Nur Ramadhan meminta Komisi Yudisial menggali motif hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus penundaan Pemilu 2024. \\\\"Menjadi catatan penting adalah bahwa jangan sampai hanya menilai soal putusannya tetapi bagaimana majelis hakim ini mengambil langkah putusan. Nah ini harus didalami oleh Komisi Yudisial,\\\\" ujar Ramadhan Ahad 5 Maret 2023. Menurut PSHK, penggalan motif bertujuan untuk mengurangi spekulasi adanya agenda penundaan Pemilu di masyarakat.\\\\"Memang perlu dipertanyakan dan juga hal ini perlu diperdalam oleh pihak-pihak termasuk masyarakat sipil ya. Dalam

hal ini untuk melihat apakah memang benar sesuai dengan apa yang mereka yakini atau di balik ini memang ada sesuatu yang terjadi,\\" katanya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan kecurigaan penundaan Pemilu 2024 adalah hal yang wajar karena sebelumnya Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo yang pernah mengungkapkan wacana penundaan Pemilu 2024 ke publik.\\"Tentu kita masih ingat dan menjadi hal wajar jika masyarakat khawatir menanggapi putusan pengadilan negeri Jakarta pusat karena dua tiga tahun ke belakang banyak sekali politisi yang menggaungkan wacana penundaan pemilu misalnya Menkomarinvest Luhut Binsar Panjaitan dengan big datanya. Kemudian, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaemin. Lalu ada Bahlil menteri BKPM kemudian baru-baru ini ada Ketua MPR Bambang Susatyo,\\" ujarnya. Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting menyampaikan pihaknya tengah mendalami putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal putusan penundaan Pemilu pada persidangan perdata Partai Prima 2 Maret 2023. Rencananya Komisi Yudisial akan memanggil ketiga Hakim PN Jakarta Pusat yaitu T. Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban.\\"Untuk itu, KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi.\\" ujarnya dalam keterangan tertulis pada 3 Maret 2023. KY juga telah berkomunikasi bersama Mahkamah Agung dalam mencermati substansi putusan yang dibuat oleh para Hakim tersebut.\\"Kami juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini serta aspek perilaku hakim yang terkait.\\"ucapnya. Menurutnya, Putusan Pengadilan sudah seharusnya bersandar aspek demokratis, aspek aspirasi masyarakat secara sosiologis dan patuh pada Undang-Undang Dasar 1945.\\"Putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa karena ada aspirasi yang hidup di masyarakat secara sosiologis, ada aspek yuridis di mana kepatuhan terhadap UUD 1945 dan undang-undang sangatlah penting, serta pertimbangan-pertimbangan lain, seperti nilai-nilai demokrasi.\\" ujarnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda Pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari, seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Selain penundaan, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi materiil

```

sebanyak Rp 500 juta. Pengadilan juga menyatakan bahwa penggugat,
yakni Partai Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam
verifikasi administrasi.Pilihan Editor: PSI Dukung KPU Ajukan Banding
atas Putusan Penundaan Pemilu\n\n        ],\n
\n\"semantic_type\": \"\", \n        \"description\": \"\"\n    }\n
\n    },\n    {\n        \"column\": \"summary\", \n        \"properties\":
{\n            \"dtype\": \"string\", \n            \"num_unique_values\": 3, \n
\n\"samples\": [\n                \"Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa
rencana pembuatan buffer zone atau kawasan penyangga yang memisahkan
Depo Pertamina Plumpang dari pemukiman warga sudah diusulkan sejak
2009. Zona ini seharusnya menjadi zona air, seperti dibuatnya sungai
untuk melindungi objek vital yang ada di dalam Depo. Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan dianggap punya andil dalam kebakaran Depo
Pertamina Plumpang karena memberikan IMB pada lahan di sekitar Depo
yang sesuai dengan aturan.\", \n                \"Setelah kebakaran Depo
Pertamina, Presiden Jokowi memerintahkan Pertamina, Gubernur DKI
Jakarta, dan Menteri BUMN untuk mencari solusi dalam 1-2 hari. Ada dua
opsi, apakah Depo dipindah atau warga yang tinggal direlokasi. Wakil
Presiden Ma'ruf Amin lebih memilih dipindahkan ke Pelabuhan. Jokowi
menyebut Depo Pertamina di Plumpang sebagai zona bahaya dan seharusnya
menjadi zona air.\", \n                \"Peneliti meminta Komisi Yudisial
menggali motif hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus
penundaan Pemilu 2024 untuk mengurangi spekulasi agenda penundaan
Pemilu. Komisi Yudisial memanggil ketiga hakim PN Jakarta Pusat untuk
dimintai klarifikasi dan melakukan pendalaman terhadap putusan
tersebut. Putusan PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda Pemilu
2024 dan membayar ganti rugi materiil sebanyak Rp 500 juta karena
dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Partai Prima merupakan
penggugat dalam verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta
Pemilu.\", \n            ], \n            \"semantic_type\": \"\", \n
\n\"description\": \"\"\n        }\n    }\n    ]\n
n}","type":"dataframe","variable_name":"df"}

```

```

missing_values = df.isnull().sum()
print("Missing values in each column:", missing_values)

```

```

Missing values in each column: Unnamed: 0      0
content      0
summary      0
dtype: int64

```

```

df['text_length'] = df['content'].apply(len)
print("\nText Length Statistics:")
print(df['text_length'].describe())

```

```

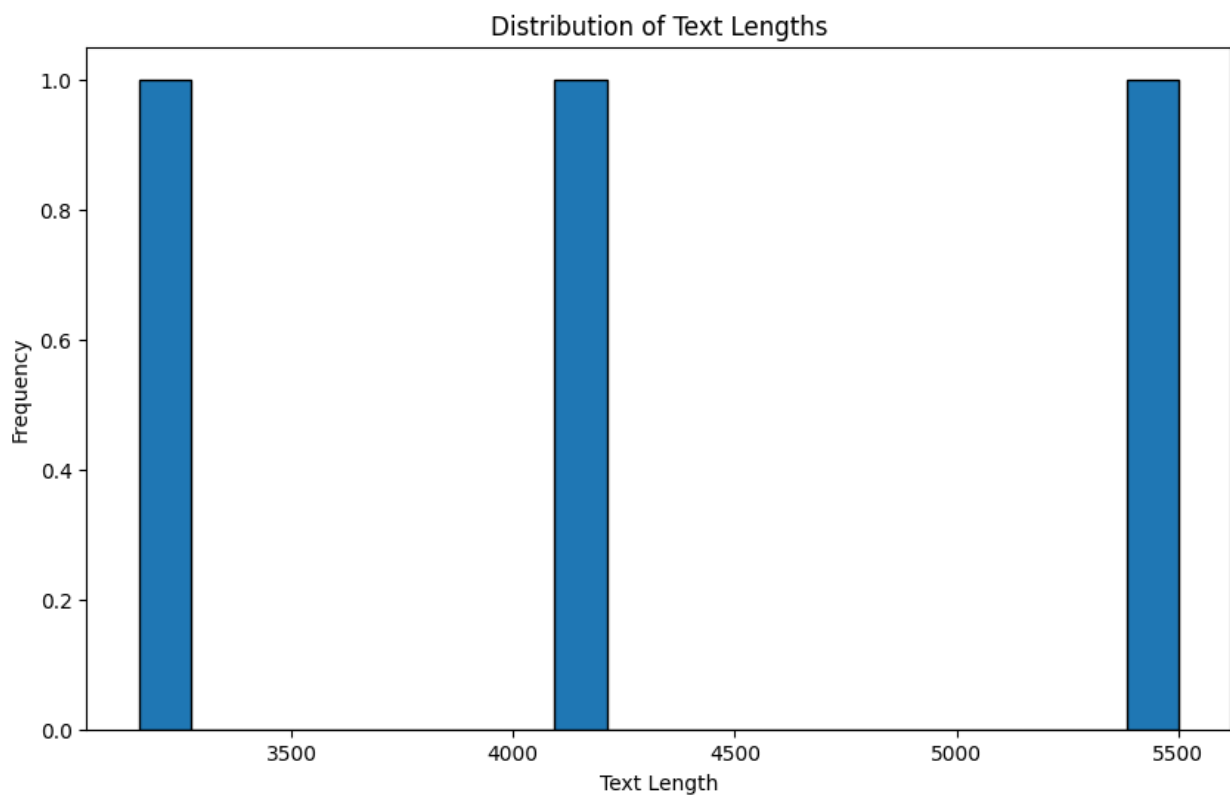
# Display the distribution of text lengths in the dataset
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(df['text_length'], bins=20, edgecolor='black')
plt.title('Distribution of Text Lengths')
plt.xlabel('Text Length')

```

```
plt.ylabel('Frequency')
plt.show()
```

Text Length Statistics:

```
count      3.000000
mean      4256.333333
std       1179.549632
min       3155.000000
25%       3634.000000
50%       4113.000000
75%       4807.000000
max       5501.000000
Name: text_length, dtype: float64
```



```
import pandas as pd
import nltk
from nltk.corpus import stopwords
from nltk.tokenize import word_tokenize
import string
import re

nltk.download('punkt')
nltk.download('stopwords')
```

```
def preprocess_text(text):
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text)
    text = re.sub(r'\n', ' ', text)
    tokens = word_tokenize(text.lower())
    stop_words = set(stopwords.words('indonesian'))
    punctuation = set(string.punctuation)
    filtered_tokens = [word for word in tokens if word.isalnum() and
word not in stop_words and word not in punctuation]
    clean_text = ' '.join(filtered_tokens)
    return text
```

```
df['content'] = df['content'].apply(preprocess_text)
df['summary'] = df['summary'].apply(preprocess_text)
```

```
df.head()
```

```
[nltk_data] Downloading package punkt to /root/nltk_data...
```

```
[nltk_data] Package punkt is already up-to-date!
```

```
[nltk_data] Downloading package stopwords to /root/nltk_data...
```

```
[nltk_data] Unzipping corpora/stopwords.zip.
```

```
{"summary":{"name": "df", "rows": 3, "fields": [
{"column": "Unnamed: 0", "properties": {
"dtype": "number", "std": 1, "min": 9,
"max": 11, "num_unique_values": 3, "samples":
[9, 10, 11]},
"semantic_type": "", "description": ""}
}, {"column": "content", "properties": {
"dtype": "string", "num_unique_values": 3,
"samples": ["TEMPO.CO, Jakarta -Buffer zone atau
kawasan penyangga yang memisahkan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta
Utara, dengan pemukiman warga kini menuai sorotan, karena sudah
diusulkan sejak 2009 silam. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang
pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 mengakui usulan tersebut
juga dibahas di era kepemimpinannya.\\\\"Dulu memang sudah direncanakan
untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai
kepada titik mencari solusi kepada penduduknya yang ada di
situ,\\\\" kata Jokowi saat ditemui mengunjungi para pengungsi
kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Minggu,
5 Maret 2023.\\\\"Tanah merah-nya ini kan padat dan penuh. Semuanya
harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan
masyarakat harus menjadi titik yang utama,\\\\" kata dia. Tanah Merah
mengacu pada Jalan Tanah Merah Bawah yang jadi lokasi kebakaran.Jokowi
menyebut seharusnya zona ini harusnya menjadi zona air, seperti
misalnya dibuat sungai yang memisahkan Depo dan pemukiman. Tujuannya
untuk melindungi objek vital yang ada di dalam Depo. \\\\"Karena
barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk
berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk,\\\\"
kata dia.Heru Ungkit Buffer ZoneSebelumnya, kebakaran terjadi di Depo
```


Pertamina pada Jumat malam, pukul 20.11 WIB, 3 Maret 2023. Usulan soal buffer zone ini diungkit Heru saat mengunjungi lokasi kebakaran pada Jumat malam tersebut. Heru menyebut tahun 2009, pemerintah daerah sudah mengusulkan buffer zone selebar 50 meter. Akan tetapi, Heru tak menjelaskan lagi apakah buffer zone ini sudah dibuat, atau hanya dibuat untuk beberapa titik saja. \\\\"Kira-kira begitu, kami kembalikan ke Pertamina,\\\" kata Heru usai menggelar rapat darurat di Pos Koramil Koja, Jakarta Utara, Sabtu dini hari, 4 Maret 2023. Heru pernah jadi Wali Kota Jakarta Utara 2014-2015 di era Gubernur DKI Jokowi, lalu berlanjut ke era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan Pemerintah Provinsi akan berkerja sama dengan Pertamina untuk melanjutkan rencana pembuatan buffer zone di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara. \\\\"Kita bikin kerja sama, lah, sama Pertamina,\\\" kata Joko kepada wartawan di Koramil Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Maret 2023. Namun, eks Kepala BPK Bali itu belum merinci soal pembuatan buffer zone ini. \\\\"Ya, pastinya, semuanya itu, upaya-upaya untuk mengarah yang lebih bagus,\\\" ujarnya. Era Fauzi Bowo Tahun 2019, Jakarta dipimpin oleh Gubernur Fauzi Bowo. Kala itu, Tempo memberitakan bahwa Kawasan Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara dipastikan akan dibersihkan di tahun tersebut. Wilayah tersebut akan dibangun buffer zone Depo Pertamina Plumpang. \\\\"Pemerintah pusat menargetkan 2009 ini buffer zone selesai dibangun,\\\" kata Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. Proses pembangunan dan pembebasan lahan di Tanah Merah, kata Bambang, dilakukan oleh Tim Penataan Depo Plumpang yang duduk sebagai penanggung jawab adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo, dan Wakil Gubernur Prijanto sebagai pelaksana. \\\\"Wali Kota mengerjakan inventarisasi, penyuluhan, dan pembebasan,\\\" kata Bambang. Proses pembangunan zona penyangga tersebut, lanjut Bambang, sudah memasuki tahap inventarisasi dan sosialisasi kepada warga. Ia mengakui tahap ini tergolong sulit, khususnya memverifikasi pemilik lahan sebenarnya. \\\\"Bermacam-macam. Ada yang punya sertifikat tanah, agendum, dan lainnya,\\\" ujarnya. IMB Anies Disorot Selain buffer zone, masalah status lahan dan bangunan warga pun jadi sorotan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan sepatutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggungjawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat malam lalu. Menurut Gilbert, sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ada permukiman dalam jarak tertentu. Lahan yang terkena kebakaran tadi adalah milik PT Pertamina. \\\\"Lahan milik PT Pertamina ditempati warga akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi IMB, yang jelas bertentangan dengan peraturan,\\\" ujar Gilbert dalam keterangannya pada Sabtu, 4 Maret 2023. Gilbert menilai IMB yang dikeluarkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI membuat persoalan semakin rumit. Menurut dia, saat itu Anies terkesan lebih mementingkan pemenuhan janji kampanye walau harus menabrak aturan. \\\\"Kesalahan itu tidak sepatutnya berulang.\\\" Berkaca dari kejadian

tersebut, Gilbert penduduk di sekitar Depo Pertamina Plumpang dipindahkan agar tidak menjadi korban lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Sementara kepada penduduk Kampung Tanah Merah pada Sabtu, 16 Oktober 2021.\\\\"Ini adalah jalan tengah yang kami ambil untuk menyelesaikan masalah bangunan-bangunan yang berada di tanah yang status legalnya belum tuntas. Tapi mereka faktanya ada di tempat ini sudah puluhan tahun,\\\\" kata Anies Baswedan di Kampung Tanah Merah, Sabtu, 16 Oktober 2021. Pertamina enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya mengenai status lahan di Kampung Tanah Merah yang ikut dilalap api kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Fokus kami saat ini penanganan warga, kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Fadjar Djoko Santoso kepada Tempo pada Sabtu. Pilihan Editor: Depo Pertamina Plumpang Bahaya Dekat Pemukiman, Jokowi: Digeser ke Reklamasi atau Warga Direlokasi\\",\\n \\\"TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati siang ini langsung menggelar rapat di Depo Plumpang, Jakarta Utara, setelah diperintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi memerintahkan agar ada solusi dalam satu dua hari ini usai kebakaran di Depo Pertamina, apakah fasilitas penyimpanan bensin ini dipindah atau warga di sekitar di relokasi.\\\\"Ini mau rapat di sana, ini rapat langsung,\\\\" kata Erick usai menemani Jokowi yang mengunjungi para pengungsi kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Ahad 5 Maret 2023. Jokowi datang bersama Erick, Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden, dan Nicke. Nicke juga membenarkan rapat digelar di Plumpang, bersama Erick dan Heru. \\\\"Iya,\\\\" kata dia, di lokasi. Di lokasi ini, Jokowi telah memerintahkan Erick, Heru, dan Pertamina, mencari solusi usai kejadian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Jokowi memberi dua opsi, Depo Pertamina dipindahkan atau warga yang tinggal direlokasi.\\\\"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas,\\\\" kata Jokowi. Ada dua opsi Jokowi belum bisa memastikan apakah nanti warga masih bisa tinggal di lokasi, jika nanti yang akhirnya Depo Pertamina yang dipindah. \\\\"Ini yang baru nanti dibicarakan, ada pilihan-pilihan, apakah deponya yang digeser apakah masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana, tapi harus segera ditemukan solusinya,\\\\" kata dia. Jokowi menyebut Depo Pertamina Plumpang ini merupakan zona bahaya. \\\\"Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,\\\\" Mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-2014. Jokowi tidak merinci lebih lanjut reklamasi yang dia maksud. Menurut dia, solusi akan dibicarakan oleh PT Pertamina dan Heru. \\\\"Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya,\\\\" ujarnya. Jokowi menyebut seharusnya Depo Pertamina ini harusnya menjadi zona air, seperti misalnya dibuat sungai yang memisahkan Depo dan pemukiman. Tujuannya untuk melindungi objek vital yang ada di dalam Depo.

\\\\"Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk,\\\\" kata dia. Wapres usul depo dipindah ke Pelabuhan Kebakaran terjadi Jumat malam, 3 Maret 2023, yang menewaskan 17 orang dan 600 lebih mengungsi. Sebelum Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah lebih dulu mengunjungi pengungsi di Plumpang. Ma'ruf mengusulkan agar depo Pertamina di Plumpang dipindah menjauhi permukiman penduduk pascaterbakar pada Jumat malam kemarin. Kebakaran depo menjalar ke pemukiman warga hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.\\\\"Saya berharap supaya depo ini lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan, di daerah Pelindo. Saya kira begitu,\\\\" ujar Ma'ruf Amin di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Maret 2023. Pilihan Editor: Jokowi Ingin Pindahkan Depo Pertamina dari Pemukiman: Lindungi Obyek Vital\\", \\n \\\"TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M Nur Ramadhan meminta Komisi Yudisial menggali motif hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan penundaan Pemilu 2024. \\\"Menjadi catatan penting adalah bahwa jangan sampai hanya menilai soal putusannya tetapi bagaimana majelis hakim ini mengambil langkah putusan. Nah ini harus didalami oleh Komisi Yudisial,\\\" ujar Ramadhan Ahad 5 Maret 2023. Menurut PSHK, penggalian motif bertujuan untuk mengurangi spekulasi adanya agenda penundaan Pemilu di masyarakat. \\\"Memang perlu dipertanyakan dan juga hal ini perlu diperdalam oleh pihak-pihak termasuk masyarakat sipil ya. Dalam hal ini untuk melihat apakah memang benar sesuai dengan apa yang mereka yakini atau di balik ini memang ada sesuatu yang terjadi,\\\" katanya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan kecurigaan penundaan Pemilu 2024 adalah hal yang wajar karena sebelumnya Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo yang pernah mengungkapkan wacana penundaan Pemilu 2024 ke publik. \\\"Tentu kita masih ingat dan menjadi hal wajar jika masyarakat khawatir menanggapi putusan pengadilan negeri Jakarta pusat karena dua tiga tahun ke belakang banyak sekali politisi yang menggaungkan wacana penundaan pemilu misalnya Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan dengan big datanya. Kemudian, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaemin. Lalu ada Bahlil menteri BKPM kemudian baru-baru ini ada Ketua MPR Bambang Susatyo,\\\" ujarnya. Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting menyampaikan pihaknya tengah mendalami putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal putusan penundaan Pemilu pada persidangan perdata Partai Prima 2 Maret 2023. Rencananya Komisi Yudisial akan memanggil ketiga Hakim PN Jakarta Pusat yaitu T. Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban. \\\"Untuk itu, KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi.\\\" ujarnya dalam keterangan tertulis pada 3 Maret 2023. KY juga telah berkomunikasi bersama Mahkamah Agung dalam mencermati substansi putusan yang dibuat oleh para Hakim tersebut\\\" Kami juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait

[illegible]

```

2024 dan membayar ganti rugi materiil sebanyak Rp 500 juta karena
dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Partai Prima merupakan
penggugat dalam verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta
Pemilu.\n\n    ],\n\n    \nsemantic_type\n": \n\n",\n\n
\n"description\n": \n\n"\n\n    }\n\n    },\n\n    {\n\n    \ncolumn\n":
\n"text_length\n",\n\n    \nproperties\n": {\n\n    \ndtype\n":
\n"number\n",\n\n    \nstd\n": 1179,\n\n    \nmin\n": 3155,\n\n
\n"max\n": 5501,\n\n    \nnum_unique_values\n": 3,\n\n
\n"samples\n": [\n\n    5501,\n\n    3155,\n\n    4113\n\n
],\n\n    \nsemantic_type\n": \n\n",\n\n    \n"description\n": \n\n"\n\n
}\n\n    }\n\n    ]\n\n}", "type": "dataframe", "variable_name": "df"}

def extractive_summary_tfidf(text, num_sentences):
    sentences = sent_tokenize(text)
    tfidf_vectorizer = TfidfVectorizer()
    tfidf_matrix = tfidf_vectorizer.fit_transform(sentences)
    similarity_matrix = cosine_similarity(tfidf_matrix, tfidf_matrix)

    sentence_scores = similarity_matrix.sum(axis=1)
    ranked_sentences = [sentences[i] for i in
sentence_scores.argsort()[-num_sentences:][::-1]]

    return " ".join(ranked_sentences)

# Example usage to test the function
text_example = df['content'][1] # Use the processed text
summary_3 = extractive_summary_tfidf(text_example, 3)
summary_5 = extractive_summary_tfidf(text_example, 5)

```

Dengan menggunakan metode TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency), fungsi `extractive_summary_tfidf` dimaksudkan untuk membuat rangkuman ekstraktif dari sebuah teks. Pertama, `sent_tokenize` digunakan untuk memecah teks menjadi beberapa kalimat berbeda. Matriks TF-IDF dari kalimat-kalimat tersebut kemudian dihitung dengan objek `TfidfVectorizer`. Matriks kesamaan kosinus (`cosine_similarity`) kemudian diambil dari matriks TF-IDF, dan skor untuk setiap kalimat dihitung berdasarkan jumlah kesamaannya dengan kalimat lainnya. Selanjutnya, kalimat diurutkan berdasarkan skornya. Untuk membentuk rangkuman, sejumlah kalimat dengan skor tertinggi dipilih sesuai dengan parameter `num_sentences`. Contoh teks dari kolom "content" dataframe `df` digunakan untuk menguji fungsi ini; hasilnya adalah rangkuman dengan 3 dan 5 kalimat.

```

summary_3

{"type": "string"}

summary_5

{"type": "string"}

# Generate summaries for the entire dataset
df['summary_3'] = df['content'].apply(lambda x:

```



```

extractive_summary_tfidf(x, 3))
df['summary_5'] = df['content'].apply(lambda x:
extractive_summary_tfidf(x, 5))

# Display the first few summaries to verify
df[['content', 'summary_3', 'summary_5']]

{"summary": "{\n  \"name\": \"df[['content', 'summary_3',
'summary_5']]\",\n  \"rows\": 3,\n  \"fields\": {\n    {\n
\"column\": \"content\", \n    \"properties\": {\n      \"dtype\":
\"string\", \n      \"num_unique_values\": 3, \n      \"samples\":
[\n        \"TEMPO.CO, Jakarta -Buffer zone atau kawasan penyangga
yang memisahkan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, dengan
pemukiman warga kini menuai sorotan, karena sudah diusulkan sejak 2009
silam. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pernah menjadi Gubernur
DKI Jakarta 2012-2014 mengakui usulan tersebut juga dibahas di era
kepemimpinannya.\\\"\\\"\\\"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di
kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik
mencarikan solusi kepada penduduknya yang ada di situ,\\\"\\\"\\\" kata Jokowi
saat ditemui mengunjungi para pengungsi kebakaran Depo Pertamina di
RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Minggu, 5 Maret 2023.\\\"\\\"\\\"Tanah
merah-nya ini kan padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi.
Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi
titik yang utama,\\\"\\\"\\\" kata dia. Tanah Merah mengacu pada Jalan Tanah
Merah Bawah yang jadi lokasi kebakaran.Jokowi menyebut seharusnya zona
ini harusnya menjadi zona air, seperti misalnya dibuat sungai yang
memisahkan Depo dan pemukiman. Tujuannya untuk melindungi objek vital
yang ada di dalam Depo. \\\"\\\"\\\"Karena barang-barang didalamnya barang-
barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi
dengan pemukiman penduduk,\\\"\\\"\\\" kata dia.Heru Ungkit Buffer
ZoneSebelumnya, kebakaran terjadi di Depo Pertamina pada Jumat malam,
pukul 20.11 WIB, 3 Maret 2023. Usulan soal buffer zone ini diungkit
Heru saat mengunjungi lokasi kebakaran pada Jumat malam tersebut.Heru
menyebut tahun 2009, pemerintah daerah sudah mengusulkan buffer zone
selebar 50 meter. Akan tetapi, Heru tak menjelaskan lagi apakah buffer
zone ini sudah dibuat, atau hanya dibuat untuk beberapa titik
saja.\\\"\\\"\\\"Kira-kira begitu, kami kembalikan ke Pertamina,\\\"\\\"\\\" kata Heru
usai menggelar rapat darurat di Pos Koramil Koja, Jakarta Utara, Sabtu
dini hari, 4 Maret 2023. Heru pernah jadi Wali Kota Jakarta Utara
2014-2015 di era Gubernur DKI Jokowi, lalu berlanjut ke era Gubernur
DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.Sekretaris Daerah DKI Jakarta
Joko Agus Setyono mengatakan Pemerintah Provinsi akan berkerja sama
dengan Pertamina untuk melanjutkan rencana pembuatan buffer zone di
kawasan Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara.
\\\"\\\"\\\"Kita bikin kerja sama, lah, sama Pertamina,\\\"\\\"\\\" kata Joko kepada
wartawan di Koramil Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Maret
2023.Namun, eks Kepala BPK Bali itu belum merinci soal pembuatan
buffer zone ini. \\\"\\\"\\\"Ya, pastinya, semuanya itu, upaya-upaya untuk
mengarah yang lebih bagus,\\\"\\\"\\\" ujar nya.Era Fauzi BowoTahun 2019,
Jakarta dipimpin oleh Gubernur Fauzi Bowo. Kala itu, Tempo

```


memberitakan bahwa Kawasan Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara dipastikan akan dibersihkan di tahun tersebut. Wilayah tersebut akan dibangun buffer zone Depo Pertamina Plumpang.\\\\"Pemerintah pusat mentargetkan 2009 ini buffer zone selesai dibangun,\\\\" kata Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. Proses pembangunan dan pembebasan lahan di Tanah Merah, kata Bambang, dilakukan oleh Tim Penataan Depo Plumpang yang duduk sebagai penanggung jawab adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo, dan Wakil Gubernur Prijanto sebagai pelaksana. \\\\"Wali Kota mengerjakan inventarisasi, penyuluhan, dan pembebasan,\\\\" kata Bambang. Proses pembangunan zona penyangga tersebut, lanjut Bambang, sudah memasuki tahap inventarisasi dan sosialisasi kepada warga. Ia mengakui tahap ini tergolong sulit, khususnya memverifikasi pemilik lahan sebenarnya. \\\\"Bermacam-macam. Ada yang punya sertifikat tanah, agendum, dan lainnya,\\\\" ujarnya. IMB Anies Disorot Selain buffer zone, masalah status lahan dan bangunan warga pun jadi sorotan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan sepatutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggungjawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat malam lalu. Menurut Gilbert, sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ada permukiman dalam jarak tertentu. Lahan yang terkena kebakaran tadi adalah milik PT Pertamina.\\\\"Lahan milik PT Pertamina ditempati warga akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi IMB, yang jelas bertentangan dengan peraturan,\\\\" ujar Gilbert dalam keterangannya pada Sabtu, 4 Maret 2023. Gilbert menilai IMB yang dikeluarkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI membuat persoalan semakin rumit. Menurut dia, saat itu Anies terkesan lebih mementingkan pemenuhan janji kampanye walau harus menabrak aturan. \\\\"Kesalahan itu tidak sepatutnya berulang.\\\\" Berkaca dari kejadian tersebut, Gilbert penduduk di sekitar Depo Pertamina Plumpang dipindahkan agar tidak menjadi korban lagi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Sementara kepada penduduk Kampung Tanah Merah pada Sabtu, 16 Oktober 2021. \\\\"Ini adalah jalan tengah yang kami ambil untuk menyelesaikan masalah bangunan-bangunan yang berada di tanah yang status legalnya belum tuntas. Tapi mereka faktanya ada di tempat ini sudah puluhan tahun,\\\\" kata Anies Baswedan di Kampung Tanah Merah, Sabtu, 16 Oktober 2021. Pertamina enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya mengenai status lahan di Kampung Tanah Merah yang ikut dilalap api kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Fokus kami saat ini penanganan warga, kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Fadjar Djoko Santoso kepada Tempo pada Sabtu. Pilihan Editor: Depo Pertamina Plumpang Bahaya Dekat Pemukiman, Jokowi: Digeser ke Reklamasi atau Warga Direlokasi\\",\\n \\\"TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati siang ini langsung menggelar rapat di Depo Plumpang, Jakarta Utara, setelah diperintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi memerintahkan agar ada solusi dalam satu dua hari ini usai kebakaran di Depo Pertamina,

apakah fasilitas penyimpanan bensin ini dipindah atau warga di sekitar di relokasi.\\\\"Ini mau rapat di sana, ini rapat langsung,\\\\" kata Erick usai menemani Jokowi yang mengunjungi para pengungsi kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Ahad 5 Maret 2023. Jokowi datang bersama Erick, Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden, dan Nicke. Nicke juga membenarkan rapat digelar di Plumpang, bersama Erick dan Heru. \\\\"Iya,\\\\" kata dia, di lokasi. Di lokasi ini, Jokowi telah memerintahkan Erick, Heru, dan Pertamina, mencari solusi usai kejadian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Jokowi memberi dua opsi, Depo Pertamina dipindahkan atau warga yang tinggal direlokasi.\\\\"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas,\\\\" kata Jokowi. Ada dua opsi Jokowi belum bisa memastikan apakah nanti warga masih bisa tinggal di lokasi, jika nanti yang akhirnya Depo Pertamina yang dipindah. \\\\"Ini yang baru nanti dibicarakan, ada pilihan-pilihan, apakah deponya yang digeser apakah masyarakatnya yang digeser. Kalau digeser tanahnya di mana, tapi harus segera ditemukan solusinya,\\\\" kata dia. Jokowi menyebut Depo Pertamina Plumpang ini merupakan zona bahaya. \\\\"Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,\\\\" Mantan Gubernur DKI Jakarta 2012-2014. Jokowi tidak merinci lebih lanjut reklamasi yang dia maksud. Menurut dia, solusi akan dibicarakan oleh PT Pertamina dan Heru. \\\\"Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya,\\\\" ujarnya. Jokowi menyebut seharusnya Depo Pertamina ini harusnya menjadi zona air, seperti misalnya dibuat sungai yang memisahkan Depo dan pemukiman. Tujuannya untuk melindungi objek vital yang ada di dalam Depo. \\\\"Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk,\\\\" kata dia. Wapres usul depo dipindah ke Pelabuhan Kebakaran terjadi Jumat malam, 3 Maret 2023, yang menewaskan 17 orang dan 600 lebih pengungsi. Sebelum Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah lebih dulu mengunjungi pengungsi di Plumpang. Ma'ruf mengusulkan agar depo Pertamina di Plumpang dipindah menjauhi permukiman penduduk pascaterbakar pada Jumat malam kemarin. Kebakaran depo menjalar ke pemukiman warga hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. \\\\"Saya berharap supaya depo ini lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan, di daerah Pelindo. Saya kira begitu,\\\\" ujar Ma'ruf Amin di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Maret 2023. Pilihan Editor: Jokowi Ingin Pindahkan Depo Pertamina dari Pemukiman: Lindungi Obyek Vital\\",\n \\\"TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M Nur Ramadhan meminta Komisi Yudisial menggali motif hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus penundaan Pemilu 2024. \\\"Menjadi catatan penting adalah bahwa jangan sampai hanya menilai soal putusannya tetapi bagaimana majelis hakim ini mengambil langkah putusan. Nah ini harus didalami oleh Komisi Yudisial,\\\" ujar Ramadhan Ahad 5 Maret 2023. Menurut PSHK, penggalan

motif bertujuan untuk mengurangi spekulasi adanya agenda penundaan Pemilu di masyarakat.\\\\"Memang perlu dipertanyakan dan juga hal ini perlu diperdalam oleh pihak-pihak termasuk masyarakat sipil ya. Dalam hal ini untuk melihat apakah memang benar sesuai dengan apa yang mereka yakini atau di balik ini memang ada sesuatu yang terjadi,\\\\" katanya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan kecurigaan penundaan Pemilu 2024 adalah hal yang wajar karena sebelumnya Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo yang pernah mengungkapkan wacana penundaan Pemilu 2024 ke publik.\\\\"Tentu kita masih ingat dan menjadi hal wajar jika masyarakat khawatir menanggapi putusan pengadilan negeri Jakarta pusat karena dua tiga tahun ke belakang banyak sekali politisi yang menggaungkan wacana penundaan pemilu misalnya Menkomarinvest Luhut Binsar Panjaitan dengan big datanya. Kemudian, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin. Lalu ada Bahlil menteri BKPM kemudian baru-baru ini ada Ketua MPR Bambang Susatyo,\\\\" ujarnya. Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting menyampaikan pihaknya tengah mendalami putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal putusan penundaan Pemilu pada persidangan perdata Partai Prima 2 Maret 2023. Rencananya Komisi Yudisial akan memanggil ketiga Hakim PN Jakarta Pusat yaitu T. Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban.\\\\"Untuk itu, KY akan melakukan pendalaman terhadap putusan itu, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim untuk dimintakan klarifikasi.\\\\" ujarnya dalam keterangan tertulis pada 3 Maret 2023. KY juga telah berkomunikasi bersama Mahkamah Agung dalam mencermati substansi putusan yang dibuat oleh para Hakim tersebut\\\\"Kami juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan putusan ini serta aspek perilaku hakim yang terkait.\\\\"ucapnya. Menurutnya, Putusan Pengadilan sudah seharusnya bersandar aspek demokratis, aspek aspirasi masyarakat secara sosiologis dan patuh pada Undang-Undang Dasar 1945.\\\\"Putusan pengadilan tidak bekerja di ruang hampa karena ada aspirasi yang hidup di masyarakat secara sosiologis, ada aspek yuridis di mana kepatuhan terhadap UUD 1945 dan undang-undang sangatlah penting, serta pertimbangan-pertimbangan lain, seperti nilai-nilai demokrasi.\\\\" ujarnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda Pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari, seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud

adalah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Selain penundaan, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi materiil sebanyak Rp 500 juta. Pengadilan juga menyatakan bahwa penggugat, yakni Partai Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi. Pilihan Editor: PSI Dukung KPU Ajukan Banding atas Putusan Penundaan Pemilu

```

],\n
{"semantic_type": "\\",
  "description": "\\",
  },\n
  {\n
    "column": "summary_3",\n
  "properties": {\n
    "dtype": "string",\n
    "num_unique_values": 3,\n
    "samples": [\n
      "Tapi mereka faktanya ada di tempat ini sudah puluhan tahun," kata Anies Baswedan di Kampung Tanah Merah, Sabtu, 16 Oktober 2021. Pertamina enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya mengenai status lahan di Kampung Tanah Merah yang ikut dilalap api kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Fokus kami saat ini penanganan warga, kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Fadjar Djoko Santoso kepada Tempo pada Sabtu. Pilihan Editor: Depo Pertamina Plumpang Bahaya Dekat Pemukiman, Jokowi: Digeser ke Reklamasi atau Warga Direlokasi Heru pernah jadi Wali Kota Jakarta Utara 2014-2015 di era Gubernur DKI Jokowi, lalu berlanjut ke era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan Pemerintah Provinsi akan berkerja sama dengan Pertamina untuk melanjutkan rencana pembuatan buffer zone di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara.
    "Pemerintah pusat mentargetkan 2009 ini buffer zone selesai dibangun," kata Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. Proses pembangunan dan pembebasan lahan di Tanah Merah, kata Bambang, dilakukan oleh Tim Penataan Depo Plumpang yang duduk sebagai penanggung jawab adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo, dan Wakil Gubernur Prijanto sebagai pelaksana.
    "Iya," kata dia, di lokasi. Di lokasi ini, Jokowi telah memerintahkan Erick, Heru, dan Pertamina, mencari solusi usai kejadian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
    "Ini mau rapat di sana, ini rapat langsung," kata Erick usai menemani Jokowi yang mengunjungi para pengungsi kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Ahad 5 Maret 2023. Jokowi datang bersama Erick, Heru yang juga Kepala Sekretariat Presiden, dan Nicke.
    "Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," kata Jokowi. Ada dua opsi Jokowi belum bisa memastikan apakah nanti warga masih bisa tinggal di lokasi, jika nanti yang akhirnya Depo Pertamina yang dipindah.
    "Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Primadengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan

```

Umur dari awal selama kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari, seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023. Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Dalam hal ini untuk melihat apakah memang benar sesuai dengan apa yang mereka yakini atau di balik ini memang ada sesuatu yang terjadi,\\\\"

katanya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan kecurigaan penundaan Pemilu 2024 adalah hal yang wajar karena sebelumnya Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo yang pernah mengungkapkan wacana penundaan Pemilu 2024 ke publik.\\\\"

],\\\\"

\\\"semantic_type\\\": \\\"\\\",\\\"

\\\"description\\\": \\\"\\\"\\\"

}\\\"

},\\\"

{\\\"

\\\"column\\\":

\\\"summary_5\\\",\\\"

\\\"properties\\\": {\\\"

\\\"dtype\\\":

\\\"string\\\",\\\"

\\\"num_unique_values\\\": 3,\\\"

\\\"samples\\\":

[\\\"

\\\"Tapi mereka faktanya ada di tempat ini sudah puluhan

tahun,\\\" kata Anies Baswedan di Kampung Tanah Merah, Sabtu, 16

Oktober 2021. Pertamina enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya

mengenai status lahan di Kampung Tanah Merah yang ikut dilalap api

kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Fokus kami saat ini

penanganan warga, kata Vice President Corporate Communication PT

Pertamina Persero Fajar Djoko Santoso kepada Tempo pada Sabtu. Pilihan

Editor: Depo Pertamina Plumpang Bahaya Dekat Pemukiman, Jokowi: Digeser

ke Reklamasi atau Warga Direlokasi Heru pernah jadi Wali Kota Jakarta

Utara 2014-2015 di era Gubernur DKI Jokowi, lalu berlanjut ke era

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sekretaris Daerah DKI

Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan Pemerintah Provinsi akan berkerja

sama dengan Pertamina untuk melanjutkan rencana pembuatan buffer zone

di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara.

\\\"Pemerintah pusat mentargetkan 2009 ini buffer zone selesai

dibangun,\\\" kata Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono di ruang

kerjanya, akhir pekan lalu. Proses pembangunan dan pembebasan lahan di

Tanah Merah, kata Bambang, dilakukan oleh Tim Penataan Depo Plumpang

yang duduk sebagai penanggung jawab adalah Gubernur DKI Fauzi Bowo,

dan Wakil Gubernur Priyanto sebagai pelaksana. Anggota Fraksi PDI

Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan sepatutnya

mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggungjawab atas

kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat malam

lalu. Menurut Gilbert, sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di

sekitar Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ada permukiman dalam jarak

tertentu. TEMPO.CO, Jakarta - Buffer zone atau kawasan penyangga yang

memisahkan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, dengan pemukiman

warga kini menuai sorotan, karena sudah diusulkan sejak 2009

silam.\\\",\\\"

\\\"\\\"\\\"Iya,\\\" kata dia, di lokasi. Di lokasi ini,

Jokowi telah memerintahkan Erick, Heru, dan Pertamina, mencari solusi

usai kejadian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

\\\"Ini mau rapat di sana, ini rapat langsung,\\\" kata Erick usai

menemani Jokowi yang mengunjungi para pengungsi kebakaran Depo

Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Ahad 5 Maret

2023. Jokowi datang bersama Erick, Heru yang juga Kepala Sekretariat

Presiden, dan Nicke. \\\"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari


```

for top in top_levels:
    col_name = f'rouge_scores_top{top}'
    print(f"ROUGE Scores for Top {top} Sentences:")
    print(df[col_name])

ROUGE Scores for Top 3 Sentences:
0    {'rouge1': (0.18421052631578946, 0.52238805970...
1    {'rouge1': (0.26851851851851855, 0.51785714285...
2    {'rouge1': (0.16129032258064516, 0.3333333333...
Name: rouge_scores_top3, dtype: object
ROUGE Scores for Top 5 Sentences:
0    {'rouge1': (0.1647940074906367, 0.656716417910...
1    {'rouge1': (0.21794871794871795, 0.60714285714...
2    {'rouge1': (0.14832535885167464, 0.4133333333...
Name: rouge_scores_top5, dtype: object

```

Hasil menunjukkan skor ROUGE untuk rangkuman tiga dan lima kalimat teratas dari beberapa teks. Skor ROUGE dihitung dengan membandingkan n-gram, frasa, dan string antara rangkuman yang dihasilkan dan referensi untuk mengevaluasi kualitas rangkuman. Dalam kasus ini, skor ROUGE-1 menunjukkan rentang recall dari 0.161 hingga 0.268 dan rentang precision dari 0.333 hingga 0.522. Untuk lima kalimat teratas, rentang recall adalah 0.148 hingga 0.217 dan rentang precision adalah 0.413 hingga 0.656. Rangkuman lima kalimat cenderung lebih sering diingat tetapi lebih tepat daripada rangkuman tiga kalimat, yang menunjukkan bahwa rangkuman lima kalimat memiliki relevansi yang lebih beragam tetapi cakupan yang lebih luas.

```

import pandas as pd
from collections import defaultdict

def average_rouge_scores(scores):
    avg_scores = defaultdict(lambda: {'precision': 0, 'recall': 0,
    'fmeasure': 0})
    n = len(scores)
    for score in scores:
        for k, v in score.items():
            avg_scores[k]['precision'] += v.precision
            avg_scores[k]['recall'] += v.recall
            avg_scores[k]['fmeasure'] += v.fmeasure
    for k, v in avg_scores.items():
        for metric in v:
            avg_scores[k][metric] /= n
    return avg_scores

top_levels = [3, 5]
avg_rouge_scores = {}

for top in top_levels:
    col_name = f'rouge_scores_top{top}'
    avg_rouge_scores[top] = average_rouge_scores(df[col_name])

```

```
# Convert the results to DataFrame for better presentation
for top in top_levels:
    avg_scores_df = pd.DataFrame.from_dict(avg_rouge_scores[top],
orient='index')
    avg_scores_df.index.name = 'Metric'
    avg_scores_df.reset_index(inplace=True)
    avg_scores_df['Top Sentences'] = top
    avg_scores_df = avg_scores_df[['Top Sentences', 'Metric',
'precision', 'recall', 'fmeasure']]
    print(f"Average ROUGE Scores for Top {top} Sentences:")
    print(avg_scores_df)
    print('\n')
```

Average ROUGE Scores for Top 3 Sentences:

	Top Sentences	Metric	precision	recall	fmeasure
0	3	rouge1	0.204673	0.457860	0.281141
1	3	rouge2	0.065166	0.150177	0.090301
2	3	rougeL	0.101927	0.227196	0.139857

Average ROUGE Scores for Top 5 Sentences:

	Top Sentences	Metric	precision	recall	fmeasure
0	5	rouge1	0.177023	0.559064	0.267513
1	5	rouge2	0.082468	0.271772	0.125833
2	5	rougeL	0.107137	0.341898	0.162278

Analisa evaluasi:

Average ROUGE Scores for Top 3 Sentences:

ROUGE-1: Precision 0.2047, Recall 0.4579, F-measure 0.2811

ROUGE-2: Precision 0.0652, Recall 0.1502, F-measure 0.0903

ROUGE-L: Precision 0.1019, Recall 0.2272, F-measure 0.1399

Average ROUGE Scores for Top 5 Sentences:

ROUGE-1: Precision 0.1770, Recall 0.5591, F-measure 0.2675

ROUGE-2: Precision 0.0825, Recall 0.2718, F-measure 0.1258

ROUGE-L: Precision 0.1071, Recall 0.3419, F-measure 0.1623

Analisis dan Pendapat: ROUGE-1, ROUGE-2, ROUGE-L Metrics:

Rouge-1 menilai kesamaan unigram, atau satuan kata, antara ringkasan dan referensi. Hasil menunjukkan bahwa precision dan recall lebih tinggi pada lima frasa tertinggi. Ini menunjukkan kemampuan untuk membuat ringkasan dengan menggabungkan lebih banyak informasi yang ada pada referensi.

ROUGE-2 memanfaatkan bigram; hasilnya menunjukkan bahwa recall lebih tinggi pada lima frasa tertinggi. Ini menunjukkan bahwa kita dapat membuat ringkasan yang lebih menyeluruh tentang urutan bigram yang sesuai dengan referensi.

Kesamaan diukur oleh ROUGE-L pada unit terpanjang dari kontinuitas seperti substring. Hasil menunjukkan bahwa precision dan recall lebih baik pada lima frasa terpenting. Ini menunjukkan kemampuan untuk membuat ringkasan dengan mempertahankan konteks yang ada pada referensi.

Pendapat tentang Ringkasan yang Dihasilkan:

Berdasarkan ROUGE scores, yang dapat saya simpulkan dengan menggunakan top 5 sentences cenderung lebih baik dan lebih efektif untuk digunakan daripada menggunakan top 3 sentences dalam hal kesesuaian dengan referensi. Ini terlihat dari nilai recall yang lebih tinggi pada ROUGE-1, ROUGE-2, dan ROUGE-L untuk top 5 sentences, menandakan bahwa ringkasan tersebut lebih mendekati informasi yang ada pada referensi. Meskipun demikian, perbedaan antara top 3 dan top 5 sentences dalam hal precision dan f-measure menunjukkan bahwa meskipun top 5 sentences mencakup lebih banyak informasi, ada potensi untuk redundansi atau kehilangan fokus pada inti dari referensi. Dalam kesimpulan, menggunakan top 5 sentences untuk menghasilkan ringkasan tampaknya memberikan hasil yang lebih baik dalam menangkap inti dari referensi, meskipun perlu diperhatikan keseimbangan antara kedalaman informasi dan keterbacaan ringkasan yang dihasilkan.